

Pemahaman Perencanaan Pembangunan Daerah menuju Pilkada Serentak 2015

SOSIALISASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2015

Aula Kantor Gubernur Kepri, 24 Maret 2015

Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau
Kantor Gubernur Kepri-Pulau Dompok Tj Pinang, 24 Maret 2015

Dadang Solihin



Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in Economics dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 LAN-RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI yang dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.

Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email dadangsol@gmail.com HP 08129322202 web: <http://dadang-solihin.blogspot.com>

Materi

- Pilkada Serentak 2015
- Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU 25/2004
- Struktur RPJMN 2015-2019
- Dimensi Pembangunan Manusia
- Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan
- Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan
- Perencanaan Pembangunan Wilayah Sumatera 2015-2019



Pilkada Serentak 2015

Sumber: Kemendagri 2014



**PILKADA
SERENTAK
TAHUN 2015**



**PEMILIHAN
SECARA LANGSUNG
OLEH RAKYAT**



**BERDASARKAN
SUBSTANSI
PERPPU NOMOR 1
TAHUN 2014**



**PERPPU NO.1/2014
AKAN DIBAHAS OLEH
DPR-RI PADA BULAN
JANUARI 2015**



**DIHARAPKAN DAPAT
DITETAPKAN MENJADI
UNDANG-UNDANG
TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA**



A. SKENARIO TAHAPAN PILKADA SERENTAK

**PEMILIHAN SERENTAK TAHAP PERTAMA
PADA TAHUN 2015 UNTUK PARA GUBERNUR,
BUPATI, DAN WALIKOTA YANG MASA JABATAN
BERAKHIR TAHUN 2015.**

**PEMILIHAN SERENTAK TAHAP KEDUA
PADA TAHUN 2018 UNTUK GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA YANG MASA JABATAN
BERAKHIR TAHUN 2016, 2017, DAN 2018.**

**→ 2016 & 2017 DIISI PENJABAT SAMPAI
DENGAN TERPILIH GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA DEFINITIF TAHUN 2018**

**PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA SERENTAK SECARA NASIONAL
PERTAMA KALI DIMULAI TAHUN 2020**

B. PROYEKSI TAHAPAN PILKADA SERENTAK



CATATAN : SUDAH TERMASUK 15 DOB TAHUN 2013 & 3 DOB TAHUN 2014.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU 25/2004

Aula Kantor Gubernur Kepri , 24 Maret 2015



Siklus Manajemen Pembangunan



Apa itu SPPN

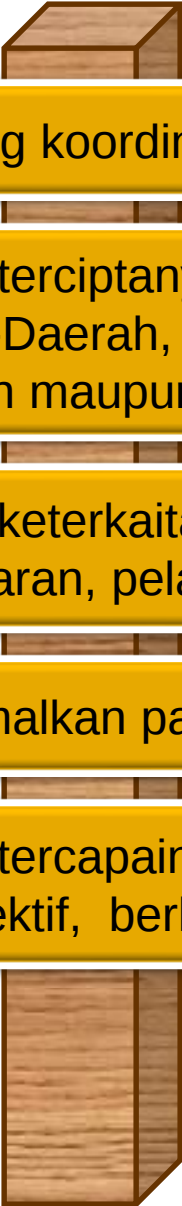


SPPN adalah

- ❑ Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan
- ❑ Untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
- ❑ Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan **masyarakat** di tingkat pusat dan **daerah**.



Tujuan SPPN

- 
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Proses Perencanaan



Pendekatan Politik:

Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (*public choice theory of planning*), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.



Proses Teknokratik:

Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.



Partisipatif:

Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholders*, antara lain melalui Musrenbang.



Proses top-down dan bottom-up:

Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Ruang Lingkup Perencanaan

NASIONAL		DAERAH	
Dokumen	Penetapan	Dokumen	Penetapan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional)	UU (Ps. 13 Ayat 1)	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)	Perda (Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional)	Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)	Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)	Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2)	Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)	Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)	Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1)	Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)	Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 21 Ayat 3)

Fungsi RPJMN

- RPJM Nasional berfungsi sebagai:
 1. Pedoman penyesuaian dalam rangka penetapan Renstra K/L; dan
 2. Bahan penyusunan dan perbaikan **RPJM Daerah** dengan memperhatikan tugas pemerintah daerah dalam mencapai sasaran nasional yang termuat dalam RPJM Nasional

Sumber: Pasal 17 PP 40/2006

RPJM Daerah

- **RPJM Daerah** merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah
- yang penyusunannya **berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional**,
- memuat:
 1. arah kebijakan keuangan Daerah,
 2. strategi pembangunan Daerah,
 3. kebijakan umum, dan
 4. program SKPD, lintas SKPD, dan
 5. program kewilayahan
- disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sumber: Pasal 5 UU 25 Tahun 2004

Persyaratan Dokumen Perencanaan: **SMART**

- **SPECIFIC**-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
- **MEASUREABLE**-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)
- **ACHIEVABLE**-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)
- **RELEVANT** (information needs of the people who will use the data)
- **TIMELY**-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)

Syarat Perencanaan

Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:

1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.



Perencanaan yang Ideal

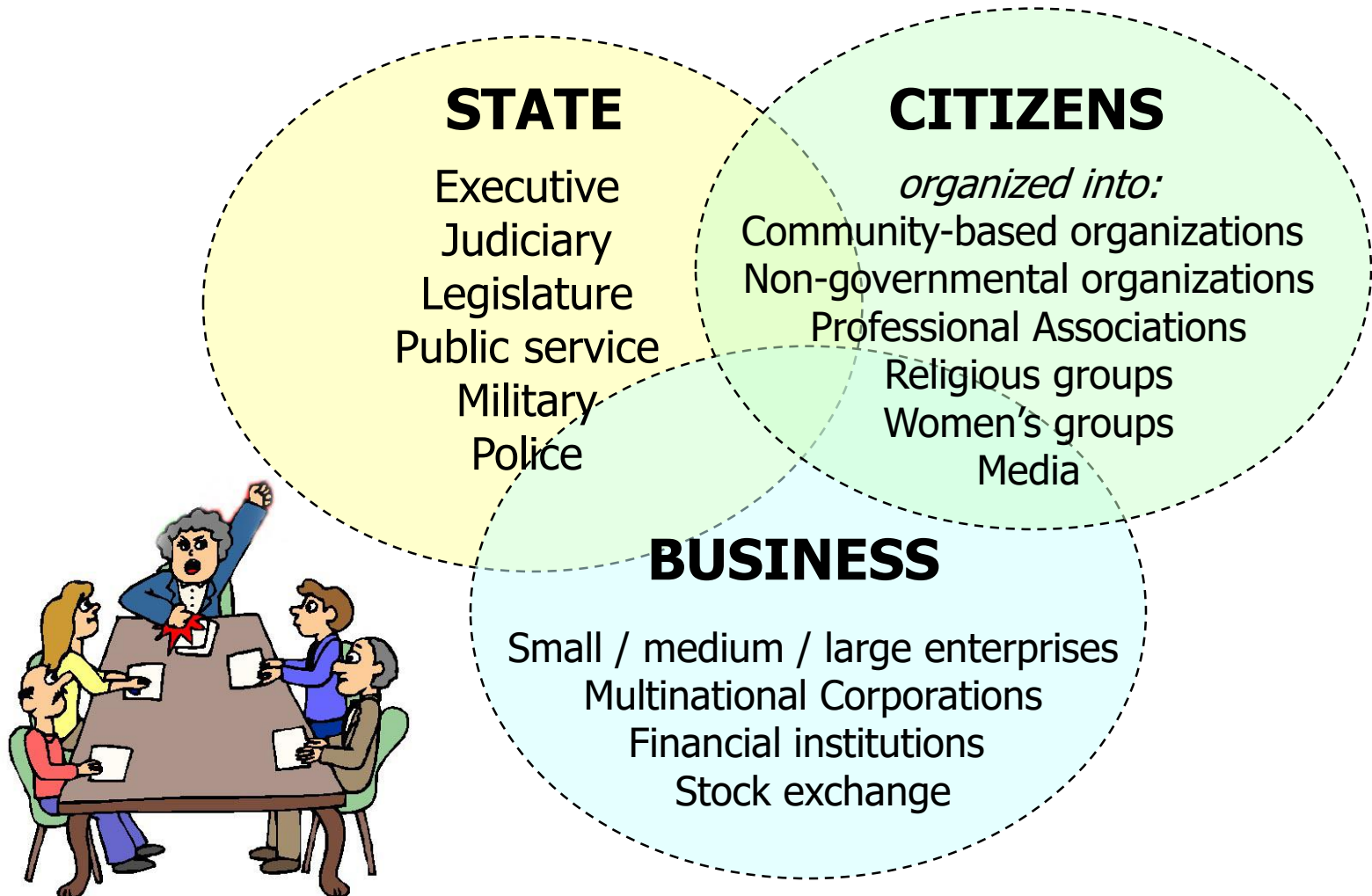
- **Prinsip partisipatif:** masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
- **Prinsip kesinambungan:** perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.
- **Prinsip holistik:** masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
- Mengandung sistem yang dapat berkembang (*a learning and adaptive system*).
- Terbuka dan demokratis (*a pluralistic social setting*).

Fungsi/Manfaat Perencanaan

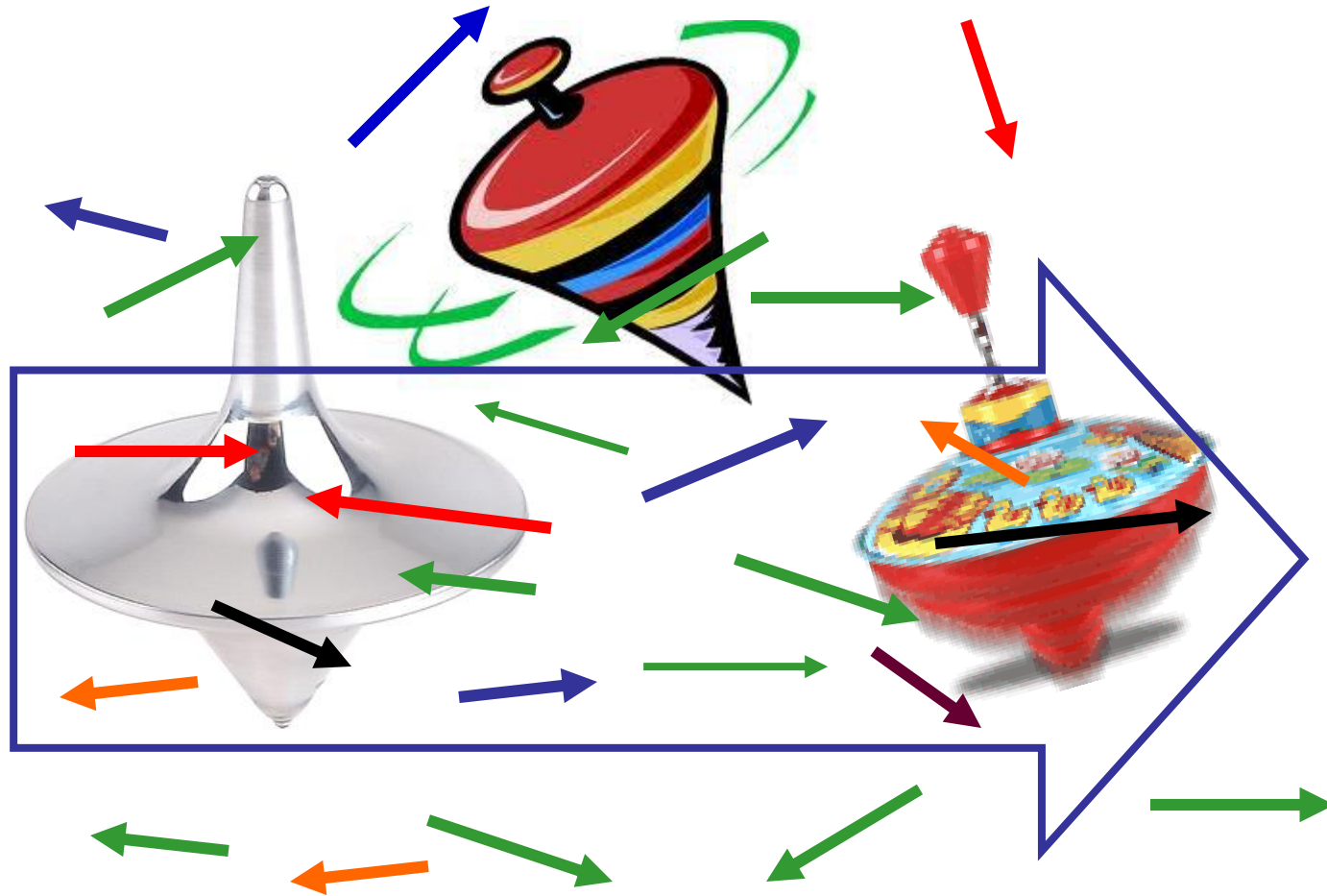
- Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders
- Sebagai penuntun arah
- Minimalisasi ketidakpastian
- Minimalisasi inefisiensi sumberdaya
- Penetapan standar dan pengawasan kualitas



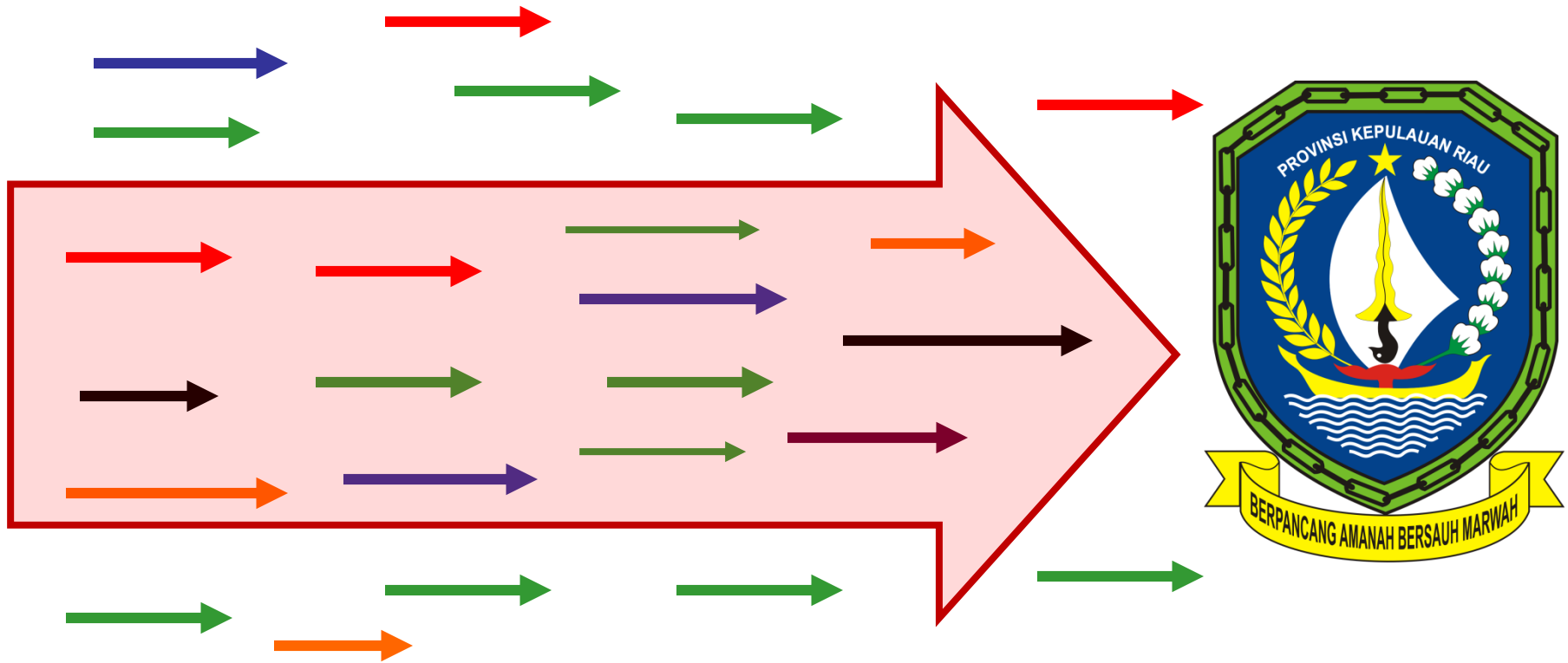
Pelaku Pembangunan: Stakeholders



Sinergi Stakeholders



Sinergi *Stakeholders*



Struktur RPJMN 2015-2019



Dasar Hukum

Penyusunan RPJMN 2015-2019

1. UU 25/2004 tentang SPPN:

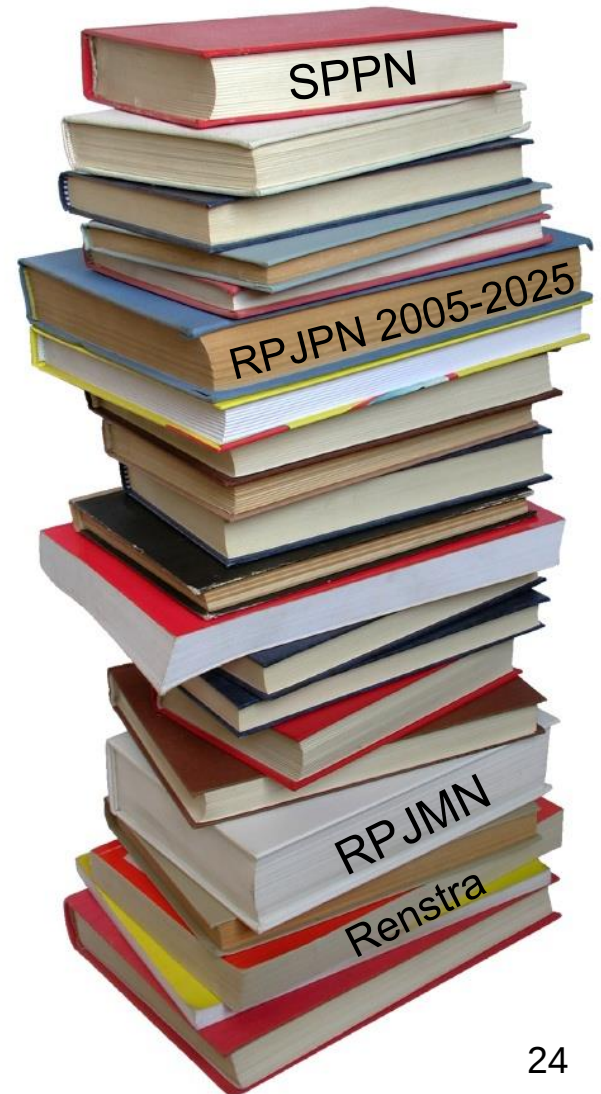
Pasal 19 ayat 1:

RPJMN ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lambat 3 bulan setelah Presiden dilantik.

2. UU 17/2007 tentang RPJPN 2005 – 2025

Arah pembangunan untuk RPJM ke-3 (2015-2019):

“Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat”.



Dokumen RPJMN 2015-2019



BUKU I: AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL

1. Pendahuluan
2. Kondisi Umum
3. Lingkungan Strategis
4. Kerangka Ekonomi Makro
5. Kebijakan Pembangunan Nasional
6. Agenda Pembangunan Nasional
7. Kaidah Pelaksanaan

BUKU II: AGENDA PEMBANGUNAN BIDANG

1. Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang
2. Pembangunan SOSBUD dan Kehidupan Beragama
3. Ekonomi
4. Bidang IPTEK
5. Bidang Politik
6. Bidang HANKAM
7. Bidang Hukum dan Aparatur
8. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang
9. Bidang Penyediaan SARPRAS
10. Bidang Pengelolaan SDA dan LH

BUKU III: AGENDA PEMBANGUNAN WILAYAH

1. Wilayah Nasional
2. Wilayah Papua
3. Wilayah Maluku
4. Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara
5. Wilayah Pulau Sulawesi
6. Wilayah Pulau Sumatera
7. Wilayah Pulau Jawa -Bali
8. Wilayah Pulau Sumatera

Struktur RPJMN 2015-2019

VISI:

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong

7 MISI

NAWACITA
9 Agenda Prioritas

TRISAKTI

**Berdaulat dalam
Bidang Politik**

- 12 Program Aksi
- 115 Prioritas Utama

**Berdikari dalam
Bidang Ekonomi**

- 16 Program Aksi

**Berkepribadian dalam
Bidang Kebudayaan**

- 3 Program Aksi

Misi

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

NAWACITA - 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional

1. Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya
3. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan
4. Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia
6. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional
7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik
8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa
9. Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia

Trisakti

I. Berdaulat dalam Bidang Politik

1. Membangun wibawa politik LN dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global.
2. Memperkuat sistem pertahanan negara.
3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Mewujudkan profesionalitas intelijen negara.
5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik.
6. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi.
7. Memperkuat politik desentralisasi dan otonomi daerah.
8. Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa.
9. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat.
10. Pemberdayaan Perempuan dalam politik dan pembangunan.
11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan.
12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Trisakti

II. Berdikari dalam Bidang Ekonomi

1. Mendedikasikan diri untuk pembangunan kualitas SDM.
2. Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan.
3. Mendedikasikan program untuk membangun daulat energi berbasis kepentingan nasional.
4. Untuk penguasaan SDA melalui 7 langkah & membangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham untuk masyarakat lokal/ sekitar tambang, penguatan kapasitas pengusaha nasional (termasuk penambang rakyat) dalam pengelolaan tambang berkelanjutan.
5. Membangun pemberdayaan buruh.
6. Membangun sektor keuangan berbasis nasional.
7. Penguatan investasi domestik.
8. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara.
9. Membangun infrastruktur.
10. Membangun ekonomi maritim.

Trisakti

11.	Penguatan sektor kehutanan.
12.	Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan.
13.	Membangun perimbangan pembangunan kawasan.
14.	Membangun karakter dan potensi wisata.
15.	Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional.
16.	Pengembangan industri manufaktur.

III. Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan

1.	Berkomitmen mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa.
2.	Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial.
3.	Akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olah raga.

Keterkaitan Visi-Misi, Nawacita, dan Trisakti

VISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

7 MISI

Keamanan nasional yg mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dg mengamankan SD maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.	Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.	Politik LN bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim	Kualitas hidup manusia Indonesia yg tinggi, maju dan sejahtera	Bangsa berdaya saing	Indonesia menjadi negara maritim yg mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional	Masyarakat yg berkepribadian dalam kebudayaan.
---	--	--	--	----------------------	--	--

NAWACITA – 9 Agenda Prioritas

Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN	Akan membuat Pemerintah tidak absen dg membangun tata kelola Pem. yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Akan membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan	Akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.	Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera	Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional	Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dg menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	Akan melakukan revolusi karakter bangsa	Akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.
--	---	---	---	--	--	--	---	---

BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK (12 Program Aksi-115 Prioritas Utama)

BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI (16 Program Aksi)

BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN (3 Program Aksi)

1. Membangun wibawa politik LN dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global (4) 2. Memperkuat sistem pertahanan negara (4) 3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat (8) 4. Mewujudkan profesionalitas intelijen negara (7)	5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik (7) 6. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi (6) 7. Memperkuat politik desentralisasi dan otda (11) 8. Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa (8)	9. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat (6) 10. Pemberdayaan Perempuan dalam politik dan pembangunan (7) 11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan (42) 12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik (5)	1. Dedikasikan pembangunan kualitas SDM 2. Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan 3. Mendedikasikan program u/ membangun daulat energi berbasis kepentingan nas. 4. Untuk penguasaan SDA melalui 7 langkah & membangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham u/ masyarakat lokal/ sekitar tambang, penguatan kapasitas pengusaha nasional (trmsuk penambang rakyat) dlm pengelolaan tambang berkelanjutan.	5. Membangun pemberdayaan buruh 6. Membangun sektor keuangan berbasis nasional 7. Penguatan investasi domestik 8. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara 9. Membangun infrastruktur	10. Membangun ekonomi maritim 11. Penguatan sektor kehutanan 12. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan 13. Membangun perimbangan pembangunan kawasan 14. Membangun karakter dan potensi wisata 15. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional 16. Pengembangan industri manufaktur	1. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sbg pembentuk karakter bangsa 2. Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial 3. Akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olah raga
---	--	--	--	--	--	--

Strategi Pembangunan

NORMA PEMBANGUNAN

- 1) Membangun untuk manusia dan masyarakat;
- 2) Upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar;
- 3) Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan.
- 4) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

3 DIMENSI PEMBANGUNAN

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

Mental / Karakter

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi &
Ketenagalistrikan

Kemaritiman dan Kelautan

Pariwisata dan Industri

DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

Antarkelompok
Pendapatan

Antarwilayah:

- (1) Desa,
- (2) Pinggiran,
- (3) Luar Jawa,
- (4) Kawasan Timur

KONDISI PERLU

Kepastian dan
Penegakan Hukum

Keamanan dan
Ketertiban

Politik & Demokrasi

Tata Kelola & RB

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

Sasaran Makro

Indikator	2014* (Baseline)	2019
Pembangunan Manusia dan Masyarakat		
▪ Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,83	76,3
▪ Indeks Pembangunan Masyarakat ¹	0,55	Meningkat
▪ Indeks Gini	0,41	0,36
▪ Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	51,8% (Oktober 2014)	Min. 95%
▪ Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan		
1. Pekerja formal	29,5 juta	62,4 juta
2. Pekerja informal	1,3 juta	3,5 juta
▪ Pertumbuhan ekonomi	5,1%	8,0 %
▪ PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010	43.403	72.217
▪ PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2000	40.785	
▪ Tingkat Kemiskinan	10,96 % *)	7,0-8,0%
▪ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,94%	4,0-5,0%

1) Indeks pembangunan masyarakat merupakan indeks komposit yang mengukur sifat kegotongroyongan, toleransi, dan rasa aman masyarakat

*) Tingkat kemiskinan Bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada Bulan November 2014

Dimensi Pembangunan Manusia



Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Pendidikan

Indikator	2014 (Baseline)	2019
Pendidikan		
▪ Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	8,1 (tahun)	8,8 (tahun)
▪ Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	94,1%	96,1 (%)
▪ Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B	50,4%	68,4 (%)
▪ Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	68,7%	84,2%
▪ Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	62,5%	81,0%
▪ Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	73,5%	84,6%
▪ Pesentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B	48,2%	65,0%
▪ Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,85 (2012)	0,90
▪ Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,53 (2012)	0,60

Arah Kebijakan

Pendidikan

1. Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas
2. Meningkatkan akses Pendidikan Menengah yang berkualitas
3. Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas
4. Meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja
5. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan
6. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Pembangunan Kesehatan

No	Indikator	2014 (Baseline)	2019
1	Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat		
	1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran	346 (SDKI 2012)	306
	2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	32 (2012/2013)	24
	3. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)	19,6 (2013)	17
	4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta (persen)	32,9 (2013)	28
2	Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular		
	1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	297 (2013)	245
	2. Prevalensi HIV (persen)	0,46 (2013)	<0,5
	3. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	25,8 (2013)	23,4
	4. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)	15,4(2013)	15,4
	5. Persentase merokok penduduk usia 15-19 tahun	7,2 (2013)	5,4
3	Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan		
	1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi	0	5.600
	2. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	-	95
	3. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan	1.015	5.600

Arah Kebijakan

1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas
2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat
3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
4. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan
5. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas
6. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
7. Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
8. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan
9. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat

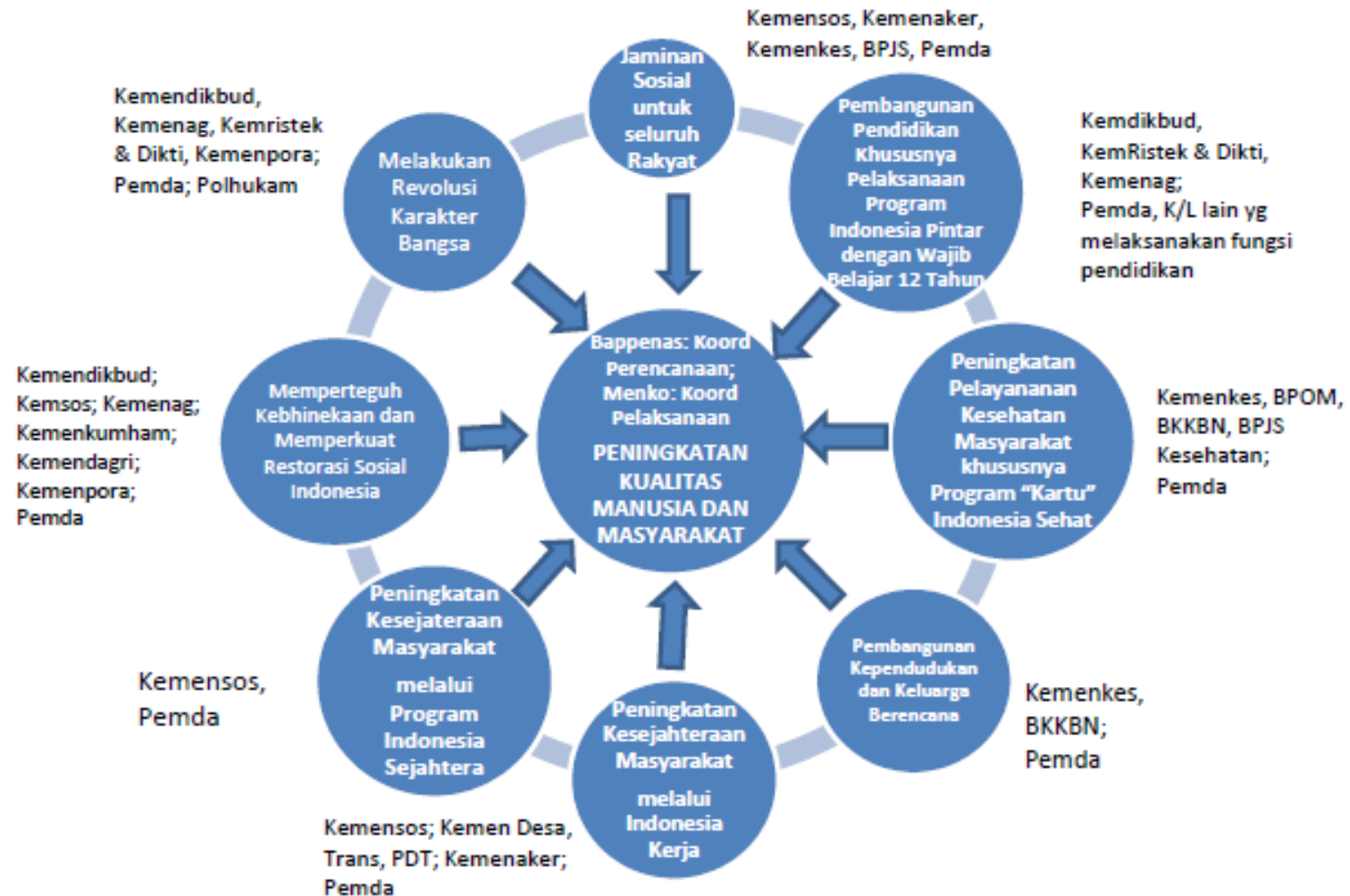
Pembangunan Perumahan, Air Minum dan Sanitasi

INDIKATOR	2014 (Baseline)	2019
Akses Air Minum Layak	70%	100%
Akses Sanitasi Layak	60,9%	100%
Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	38.431 Ha	0 Ha
Kekurangan Tempat Tinggal (Backlog) Berdasarkan Perspektif Menghuni	7,6 Juta	5 Juta

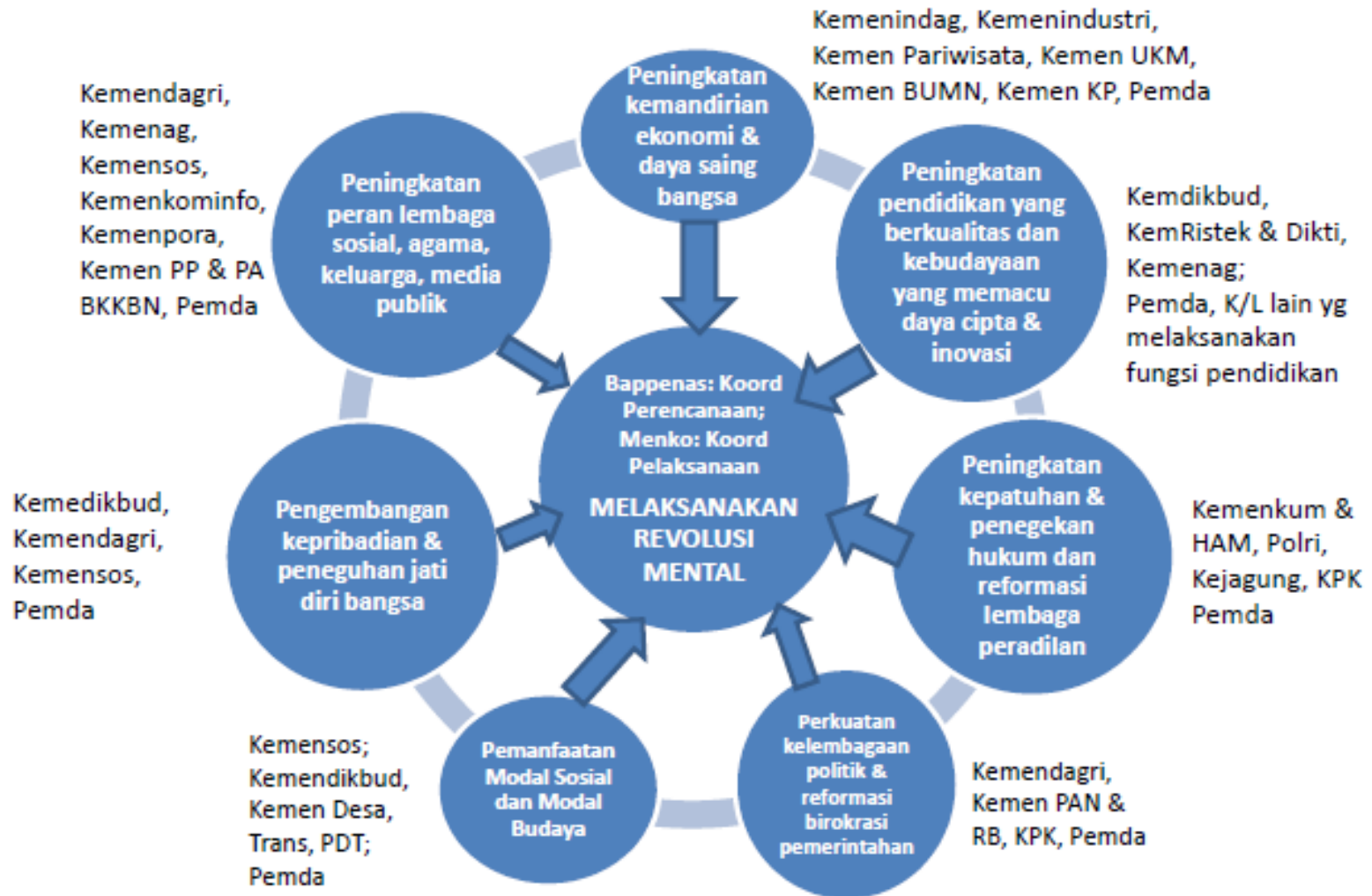
Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai
2. Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi
3. Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen asset
4. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat
5. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi

Pembangunan Manusia dan Masyarakat



Revolusi Mental



Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan



Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan

Kedaulatan Pangan

INDIKATOR	2014 (baseline)	2019
Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan		
- Padi (Juta Ton)	70,6	82,0
- Jagung (Juta Ton)	19,13	24,1
- Kedelai (Juta Ton)	0,92	2,6
- Gula (Juta Ton)	2,6	3,8
- Daging Sapi (Ribuan Ton)	452,7	755,1
- Produksi perikanan (juta ton)	12,4	18,8
Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi:		
- Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan, air tanah dan rawa (juta ha)	8,9	9,89
- Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha)	2,71	3,01
- Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak (ribu ha)	189,75	304,75
- Pembangunan waduk)*	21	49

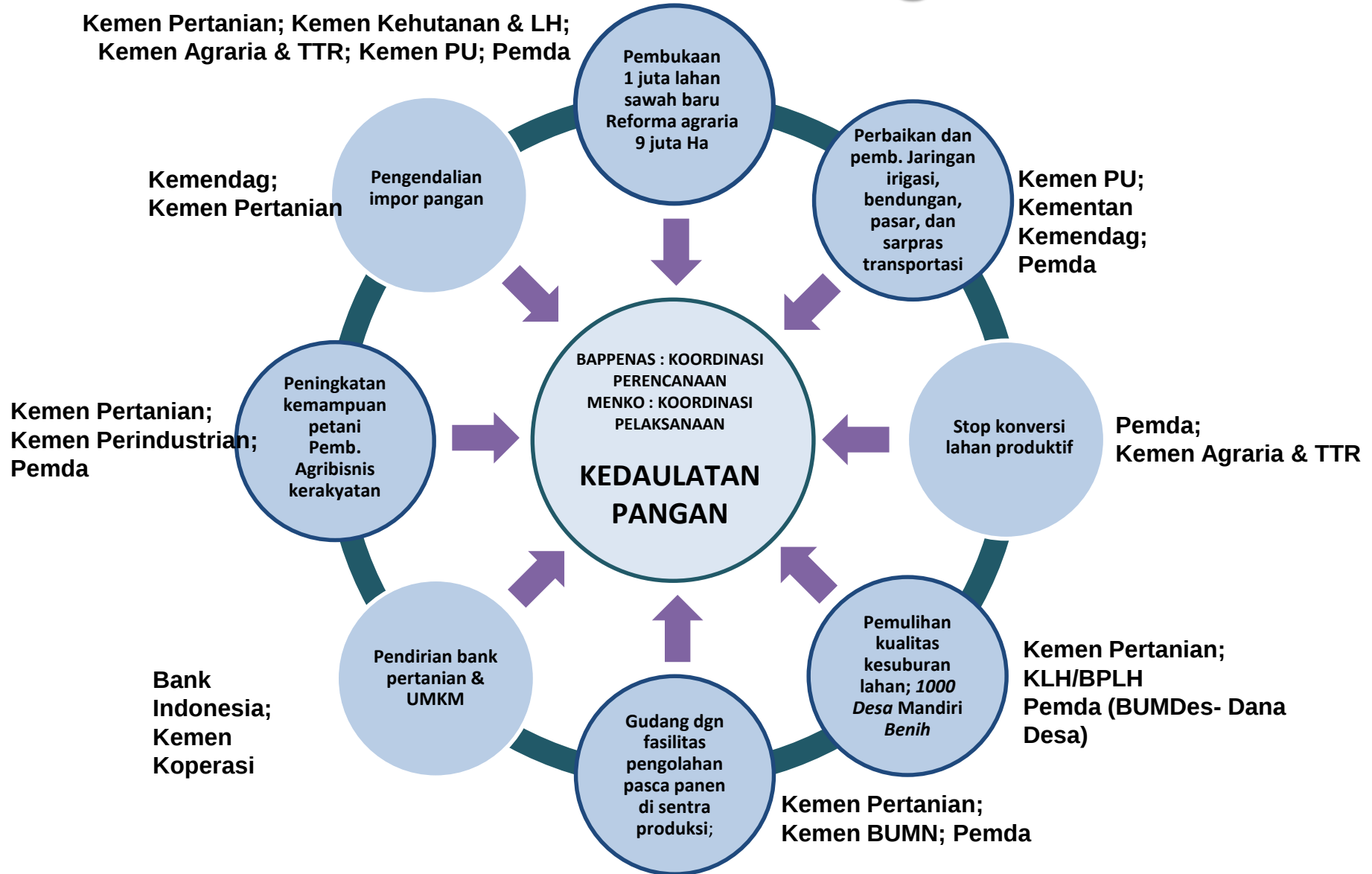
CACATAN:

Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi. Untuk ke-4 tahun fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga.

ARAH KEBIJAKAN:

- Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi DN: Padi:** (i) penyelesaian pengaman lahan berkelanjutan (**menahan konversi sawah**) dan perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan-1.000 desa berdaulat benih dan 1.000 desa pertanian organik; (iv) bank untuk pertanian-UKM-Koperasi; **Produk perikanan:** 40 juta ton (ikan dll)**
- Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan:** (i) pembangunan gudang dg fasilitas pasca panen; pengendalian impor melalui pemberantasan mafia impor; (ii) penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan sistem logistik ikan.
- Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat:** (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii) penggunaan pangan lokal non beras
- Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan:** (i) benih adaptif perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian.

Kedaulatan Pangan



Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan

Kedaulatan Energi

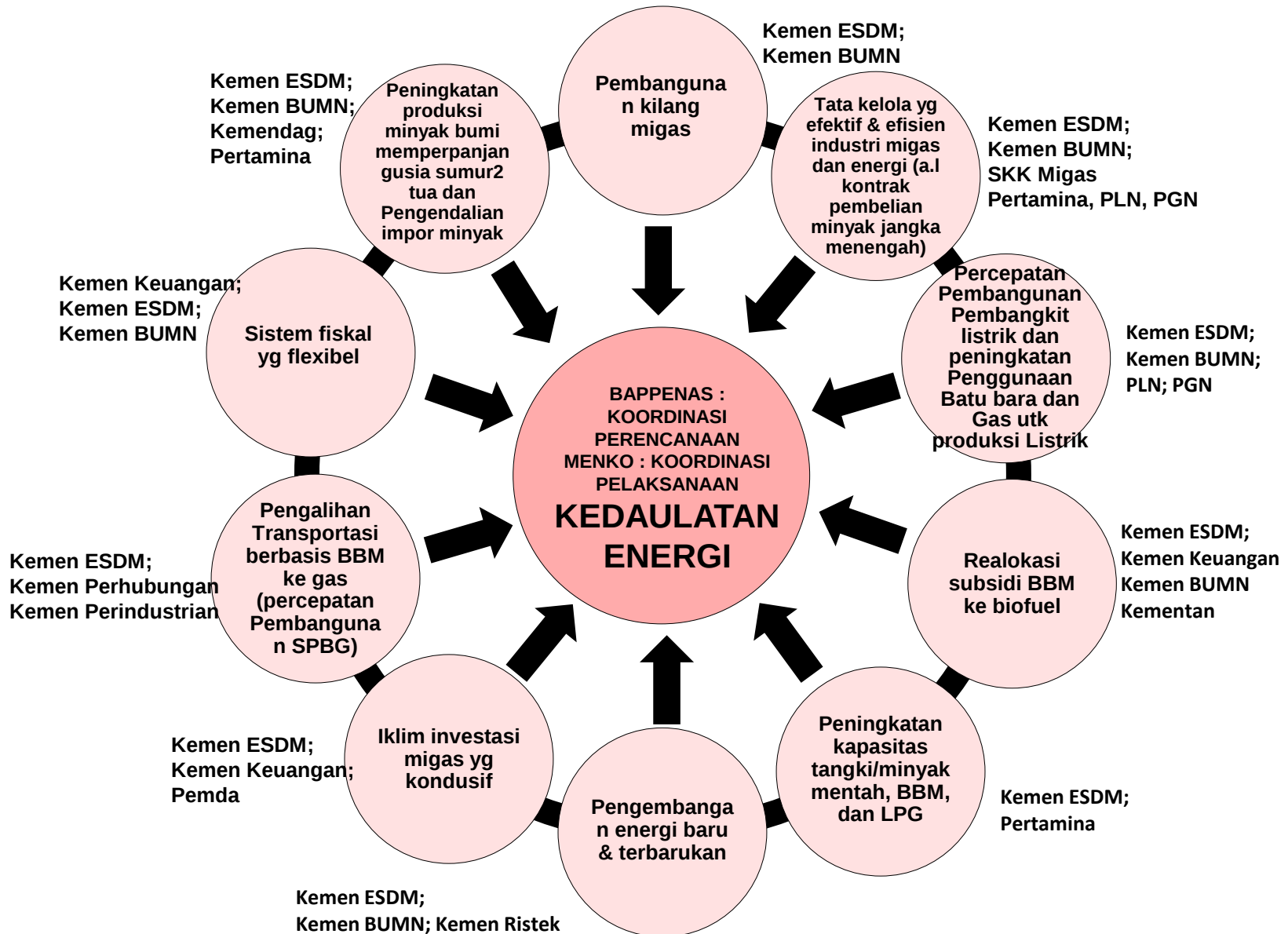
INDIKATOR	2014 (baseline)	2019*
Rasio elektrifikasi	81,5%	96,6%
Konsumsi Listrik Perkapita	843KWh	1.200KWh
Peningkatan Produksi SD Energi:		
- Minyak Bumi (ribu BM/hari)	818	700
- Gas Bumi (ribu SBM/hari)	1.224	1.295
- Batubara (Juta Ton)	421	400
Penggunaan DN (DMO):		
- Gas bumi DN	53%	64%
- Batubara DN	24%	60%
Regasifikasi onshore (unit)	-	6
Pembangunan FSRU (unit)	2	3
Jaringan pipa gas (km)	11.960	17.960
Pembangunan SPBG (unit)	40	118
Jaringan gas kota (sambungan rumah)	200 ribu	1 jt
Pembangunan kilang baru (unit)	-	1

* Dengan badan usaha

ARAH KEBIJAKAN:

1. Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas dan batubara): lapangan baru, IOR/EOR, pengembangan gas non konvensional (shale gas dan CBM).
2. Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaan kontrak jangka menengah dan panjang untuk SD energi.
3. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi: (i) insentif dan harga yang tepat; (ii) pemanfaatan bahan bakar nabati.
4. Meningkatkan Aksesibilitas: (i) mendorong penggunaan SD energi utk penggunaan setempat; (ii) pemanfaatan gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG.
5. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i) pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan utk teknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii) peningkatan peran perusahaan layanan energi (ESCO).
6. Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran
7. Memanfaatkan potensi Sumber Daya Air untuk PLTA (kelistrikan)

Kedaulatan Energi



Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan

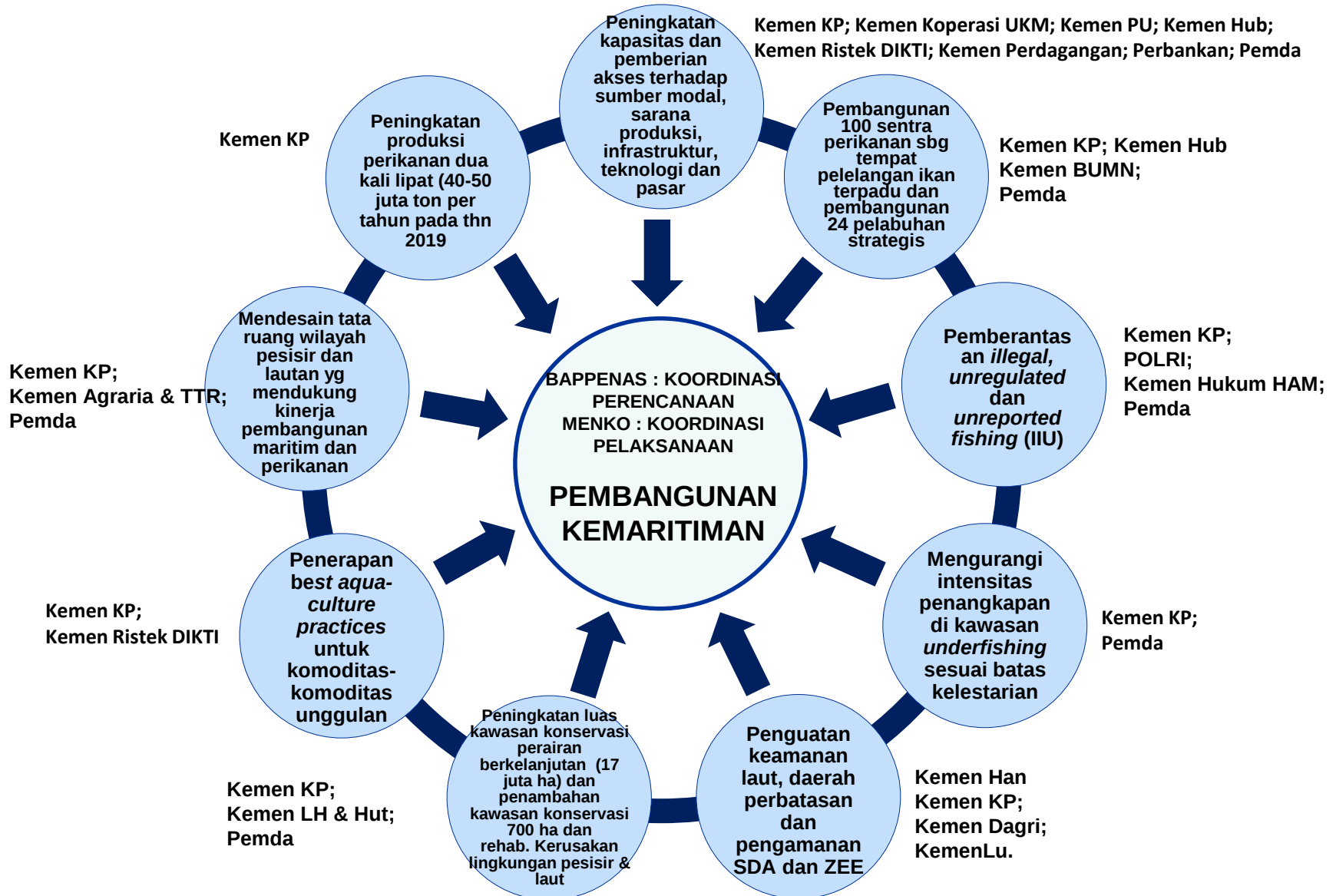
Maritim dan Kelautan

INDIKATOR	2014 (Baseline)	2019
Memperkuat Jatidiri sebagai negara Maritim		
▪ Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB	13.466	17.466 (Selesai th 2017)
▪ Penyelesaian batas maritim antar negara	1 negara	9 negara
Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar		
• Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan	52%	87%
Membangun Konektivitas Nasional:		
▪ Pengembangan pelabuhan untuk menunjang tol laut	--	24
▪ Pengembangan pelabuhan penyeberangan	210	270
▪ Pembangunan kapal perintis	50 unit	104 unit
Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan		
▪ Produksi hasil perikanan (juta ton)	22,4	40-50
▪ Pengembangan pelabuhan perikanan	21 unit	24 unit
▪ Peningkatan luas kawasan konservasi laut	15,7 juta ha	20 juta ha

ARAH KEBIJAKAN:

1. Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau2 dan pendaftarannya;
2. Pengaturan dan pengendalian ALKI;
3. Penguatan lembaga pengawasan laut;
4. Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana;
5. Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda;
6. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;
7. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan;
8. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut;
9. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan lptek kelautan;
10. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir

Pembangunan Kemaritiman



Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan

Pariwisata dan Industri

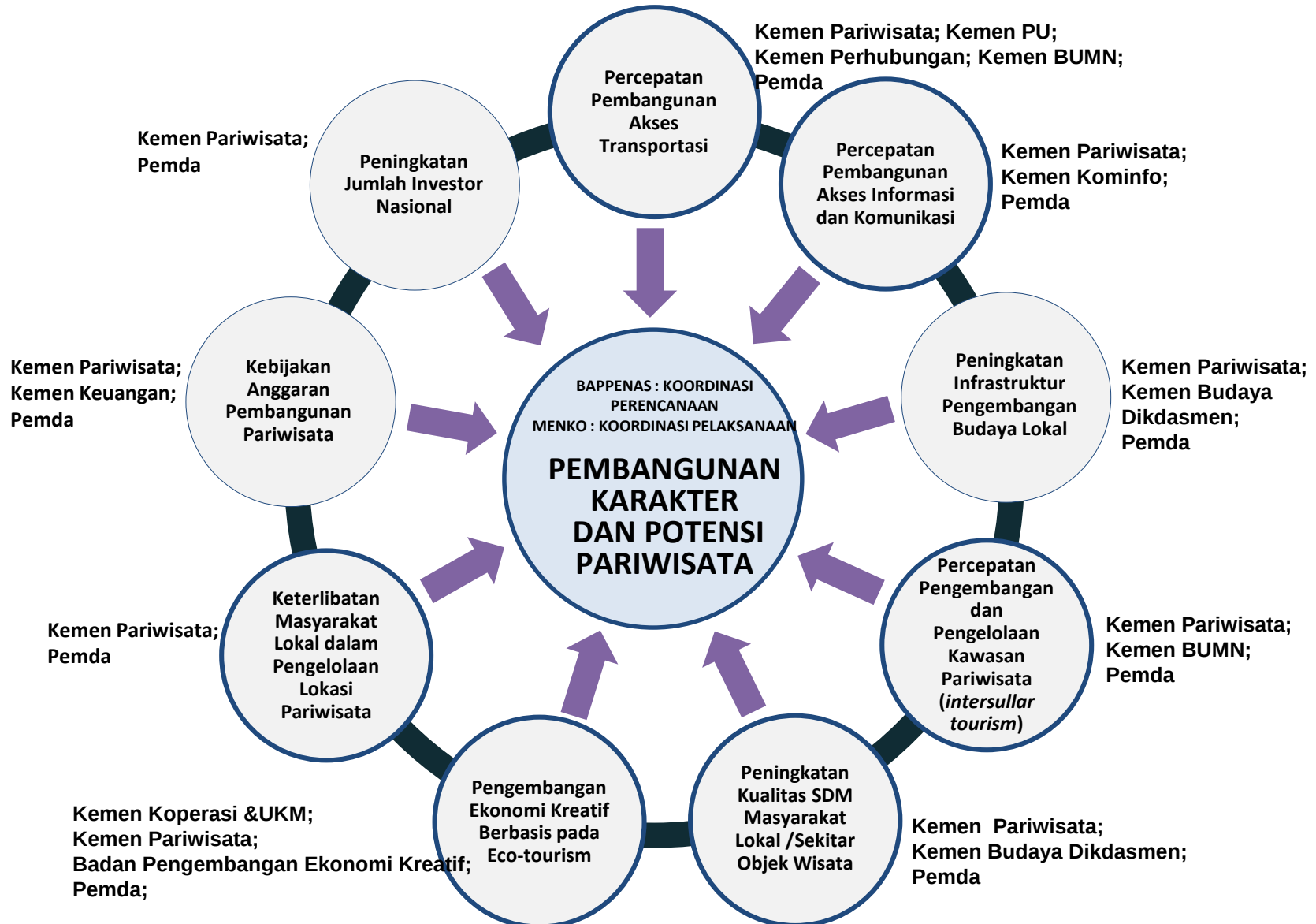
INDIKATOR	2014 (Baseline)	2019
Pariwisata		
▪ Kontribusi terhadap PDB Nasional	4,2%	8 %
▪ Wisatawan Mancanegara (Orang)	9 juta	20 juta
▪ Wisatawan Nusantara (Kunjungan)	250 juta	275 juta
▪ Devisa (triliun rupiah)	120	260
Industri		
Sasaran Pertumbuhan:		
▪ Industri (%)	4,7	8.6
▪ Kontribusi dalam PDB	20,7%	21,6%
▪ Penambahan jumlah Industri skala menengah dan besar	-	9.000 unit*

* Kumulatif 5 tahun

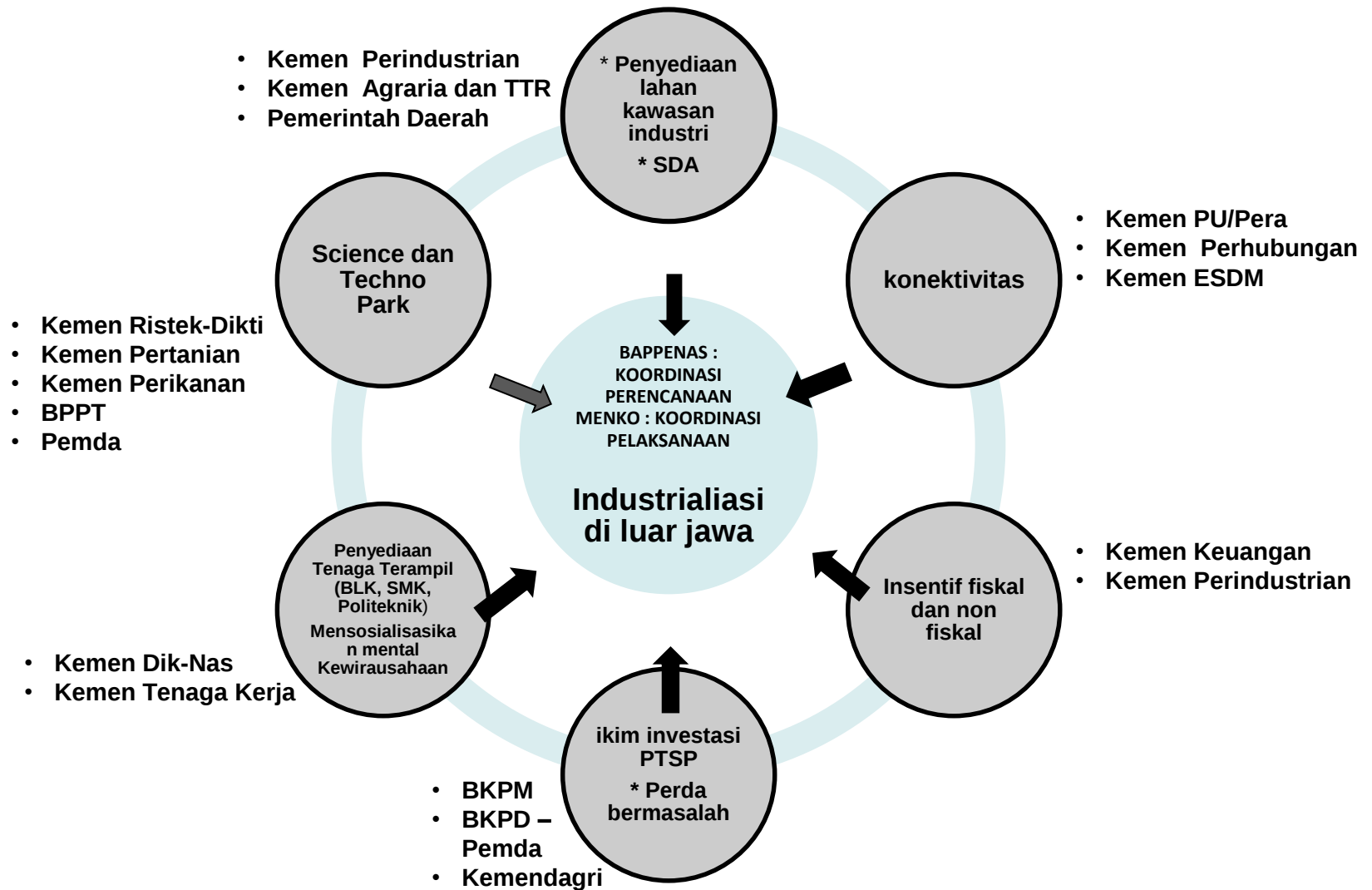
ARAH KEBIJAKAN:

1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara
2. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri
3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk / jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjdai fokus pemasaran
4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata: membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional
5. Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau Jawa
6. Penumbuhan Populasi Industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha
7. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai Ekspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja)

Pembangunan Karakter dan Potensi Pariwisata



Pembangunan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa



Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan



Sasaran Pembangunan Dimensi Pemerataan

INDIKATOR	2014 (Baseline)	2019
Perlindungan sosial bagi Penduduk Kurang Mampu (40% penduduk termiskin)		
▪ Kepemilikan Jaminan Kesehatan	86%	100%
▪ Akses Pangan Bernutrisi	60%	100%
▪ Akses thd Pelayanan Keuangan	4,2%	25%
Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)		
▪ Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga yang ditandai dengan meningkatnya keterampilan kerja/usaha, tersedianya alternatif usaha/kerja sebagai sumber penghidupan, tersedianya sarana prasarana pendukung ekonomi, meningkatnya akses pasar bagi pengembangan usaha mikro/kecil		
Peningkatan daya saing tenaga kerja		
▪ Penyediaan lapangan kerja (2015-2019)		10 juta (rata-rata 2 juta/thn)
▪ Persentase tenaga kerja formal	40,5%	51,0%
Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan		
▪ Pekerja formal	29,5 juta	62,4 juta
▪ Pekerja Informal	1,3 juta	3,5 juta
Meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja		
▪ Jumlah pelatihan	1.921.283*	3.552.950**
▪ Jumlah sertifikasi	576.887*	2.280.764**
▪ Jumlah tenaga kerja keahlian menengah yang kompeten	30,0%	42,0%
▪ Kinerja lembaga pelatihan milik negara menjadi berbasis kompetensi	5,0%	25,0%

SASARAN:

Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 7,0%-8,0 persen dan pengangguran terbuka menjadi 4,0%-5,0% di tahun 2019.

ARAH KEBIJAKAN:

- Membangun landasan yang kuat agar ekonomi tumbuh menghasilkan kesempatan kerja yang berkualitas
 - Memperluas industri manufaktur untuk memperluas lapangan kerja baru berkualitas
 - Dukungan regulasi yang mendorong iklim investasi
 - Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial
- Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif
 - Penataan asistensi sosial, melalui perluasan cakupan dan perbaikan desain program: Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sejahtera (KKS)
 - Perluasan cakupan SJSN bagi penduduk rentan dan pekerja informal
 - Penguatan kelembagaan sosial
- Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar
 - Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar
 - Peningkatan jangkauan layanan dasar
 - Pengembangan dan penguatan sistem monev terkait penyediaan layanan dasar
- Pengembangan penghidupan berkelanjutan
 - Meningkatkan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan sistem layanan keuangan mikro
 - Meningkatkan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran
 - Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha
 - Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan

Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antarwilayah

Indikator	2014 (Baseline)	2019
Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan		
a. Penurunan desa tertinggal		s.d. 5,000 desa tertinggal
b. Peningkatan desa mandiri		paling sedikit 2,000 desa
Pengembangan Kawasan Perbatasan		
a. Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/ PKSN)	3 (111 lokasi prioritas)	10 (187 lokasi prioritas)
b. Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan	12 pulau-pulau kecil terluar berpenduduk	92 pulau kecil terluar/ terdepan

ARAH KEBIJAKAN:

Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa termasuk permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografis Desa.
2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi.
3. Pembangunan sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan.
4. Pengembangan komunitas teknologi perdesaan.
5. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi
6. Penguatan Pemerintahan Desa
7. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi.
8. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota.

Pengembangan Kawasan Perbatasan

1. Peningkatan keamanan wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman.
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan melalui peningkatan penyediaan kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi, akses infrastruktur.

Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antarwilayah

Indikator	2014 (Baseline)	2019
Pembangunan Daerah Tertinggal		
a. Jumlah Daerah Tertinggal	122 (termasuk 9 DOB)	42
b. Kabupaten terentaskan	70	80
c. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	7,1% *)	7,24%
d. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	16,64%	14,0%
e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal	68,46	69,59
Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa		
a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa	7	14
b. Kawasan Industri	n.a.	14
c. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPPBPB)	4	4

- rata-rata 2010-2014
- ** di Pulau Jawa ada 1 KEK (KEK Tanjung Lesung)

ARAH KEBIJAKAN:

Pengembangan Daerah Tertinggal

1. Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan
2. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik.
3. Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung SDM yang berkualitas.
4. Pembangunan infrastruktur./konektivitas.

Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa

1. Pengembangan potensi ekonomi wilayah, melalui percepatan Industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA → (a) menciptakan nilai tambah; (b) menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisata.
2. Percepatan pembangunan konektivitas/ infrastruktur
3. Pengembangan SDM dan IPTEK
4. Pengembangan regulasi dan kebijakan
5. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha a.l: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); dan pemberian insentif fiskal dan non fiskal .

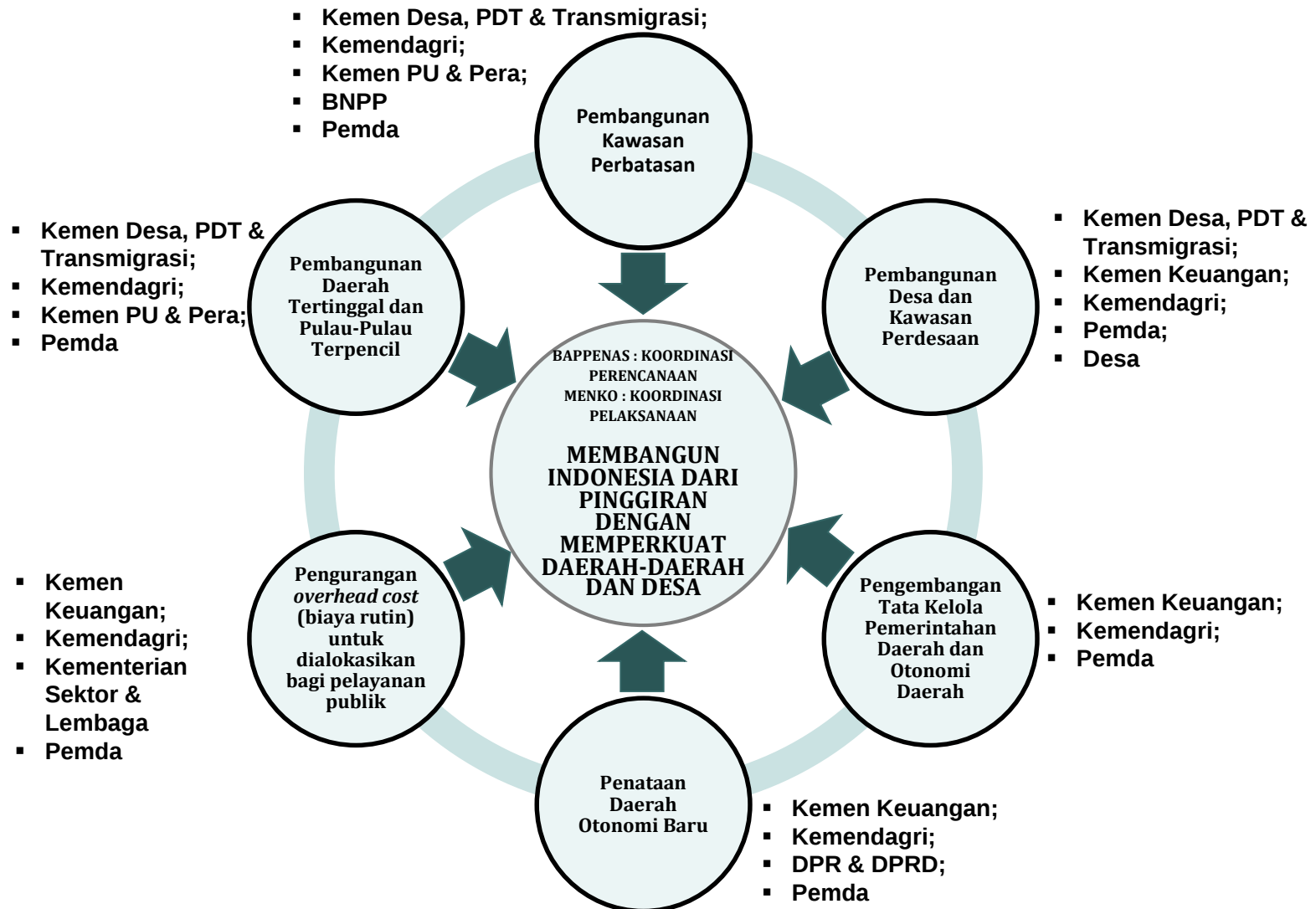
Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antarwilayah

Indikator	2014 (Baseline)	2019
Pembangunan Kawasan Perkotaan		
a. Pembangunan Metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan Pusat Investasi	2	2+ 5(usulan baru)
b. Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa	43 kota belum optimal perannya	20 dioptimalkan perannya
c. Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	--	39 pusat pertumbuhan yang diperkuat
d. Pembangunan 10 Kota Baru Publik	--	10 Kota Baru

ARAH KEBIJAKAN:

1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional.
2. Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni.
3. Pembangunan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana.
4. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal.
5. Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan.

Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa



Perencanaan Pembangunan Wilayah Sumatera 2015-2019



Tema Besar Pembangunan Wilayah Sumatera

1. Salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional.
2. Lumbung energi nasional termasuk pengembangan energi terbarukan biomas.
3. Pengembangan hilirisasi komoditas batu bara
4. Industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin.
5. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, industri perkebunan, dan industri pertambangan.

Tujuan Strategis

- Tujuan pengembangan Wilayah Sumatera tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Sumatera dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui:
 1. Pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin;
 2. Penyediaan infrastruktur wilayah;
 3. Peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Sasaran

Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	5.6	5.8	6.0	6.2	6.2
Sumatera Utara	6.1	6.7	7.2	7.6	8.1
Sumatera Barat	5.4	6.0	6.4	7.0	7.8
Riau	4.6	4.9	5.1	5.8	6.8
Kepulauan Riau	6.7	7.4	7.0	7.5	7.5
Jambi	6.5	7.0	7.4	8.1	8.9
Sumatera Selatan	5.8	6.1	6.2	6.7	7.5
Kep. Bangka Belitung	5.5	6.1	6.8	7.1	7.5
Bengkulu	5.9	6.7	7.3	7.7	8.4
Lampung	6.2	6.8	7.2	7.7	8.2

Sasaran

Tingkat Kemiskinan Wilayah

Wilayah	Tingkat Kemiskinan (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	16.2	14.9	13.7	12.5	11.3
Sumatera Utara	9.2	8.7	8.1	7.4	6.7
Sumatera Barat	6.7	6.2	5.8	5.3	4.8
Riau	7.0	6.4	5.8	5.3	4.7
Kepulauan Riau	5.1	4.6	4.3	3.8	3.4
Jambi	5.9	5.4	5.0	4.6	4.2
Sumatera Selatan	12.2	11.3	10.4	9.5	8.6
Kep. Bangka Belitung	3.9	3.6	3.3	3.0	2.7
Bengkulu	14.7	13.6	12.5	11.4	10.3
Lampung	14.1	13.6	12.6	11.5	10.5

Sasaran

Tingkat Pengangguran Wilayah

Wilayah	Tingkat Pengangguran (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	8.5	8.2	7.9	7.5	7.2
Sumatera Utara	6.0	5.8	5.6	5.3	5.2
Sumatera Barat	6.1	5.9	5.7	5.4	5.2
Riau	3.8	3.7	3.5	3.3	3.1
Kepulauan Riau	5.1	4.8	4.6	4.3	4.1
Jambi	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6
Sumatera Selatan	5.5	5.3	5.1	4.9	4.7
Kep. Bangka Belitung	3.3	3.1	3.0	2.9	2.7
Bengkulu	3.4	3.3	3.1	3.0	2.9
Lampung	4.9	4.7	4.6	4.4	4.3

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi Kepulauan Riau

PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG

1. Pembangunan Jalur KA Batu Ampar - Bandara Hang Nadim*
2. Pembangunan Jalur KA Tanjung Uncang - Batam Center*

PERHUBUNGAN DARAT

1. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Batam*

PERHUBUNGAN LAUT

1. Pengembangan Pelabuhan Dompok
2. Pengembangan Pelabuhan Pulau Laut
3. Pengembangan Pelabuhan Pulau Subi
4. Pengembangan Pelabuhan Letung
5. Pengembangan Pelabuhan Kabil (Tanjung Sauh)*
6. Pengembangan Pelabuhan Malarko
7. Pengembangan Pelabuhan kontainer Batu Ampar Batam
8. Pembangunan Pelabuhan Subang Mas
9. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Moch
10. Pembangunan Pelabuhan Punggur Kabil
11. Pembangunan Pelabuhan Belakang Padang
12. Pengembangan Pelabuhan Midai
13. Pengembangan Pelabuhan Pulau Laut

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi Kepulauan Riau

14. Pengembangan Pelabuhan Serasan
15. Pengembangan Pelabuhan Dabo Singkep
16. Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan Sekupang
17. Pengembangan dan pembangunan Balai Diklat Perhubungan Di Jalur Trans Bareleng

PERHUBUNGAN UDARA

1. Pembangunan Bandara Letung Anambas
2. Pembangunan Bandara Tambelan
3. Pemotongan Bukit Bandara Raja Haji Fisabillah
4. Pengembangan bandara Dabo

JALAN

1. Pembangunan Jalan Sei Buluh-Jagoh-Kote-Dabo
2. Pembangunan Jalan Sei Tenan-Sp. Limbung-Tj. Buton
3. Pembangunan Jalan Simpang Jam - Batu Ampar
4. Pembangunan Jalan Tj Uban-Mengkulu Bantan bayu-Sp. Gesek
5. Pembangunan Jalan Tol Batu Ampar - Muka Kuning - Hang Nadim
6. Pembangunan Flyover Sp. Kabil dan Sp. Jam
7. Pembangunan Jalan Lingkar Kota Tanjung Pinang - Kab. Bintan

ASDP

1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Tj. Pinang
2. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Tambelan*

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi Kepulauan Riau

1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Selat Lampah
2. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Lingga
3. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Matak (Kep. Anambas) Lintas Tj Uban-Matak*
4. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Penarik (P. Lingga) Lintas Dabo – Penarik*
5. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Penagi (P. Bunguran) Lintas Natuna - Sintete*
6. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sebangka*
7. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Letung*
8. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Tarempa*

KETENAGALISTRIKAN

1. PLTG/MG TB. Karimun Peaker 40 MW
2. PLTMG Tanjung Pinang-2 30 MW
3. PLTMG Natuna-2 25 MW
4. PLTMG Bengkalis 18 MW
5. PLTMG Tanjung Batu-1 15 MW
6. PLTMG Dabo Singkep-1 15 MW
7. PLTMG Selat Panjang 15 MW
8. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi
9. Penambahan Kapasitas Interkoneksi Batam – Bintan 150 KVA
10. PLTS Komunal 1 MW
11. PLTU TB. Karimun Peakaer 20 MW

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi Kepulauan Riau

TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI

SUMBER DAYA AIR

1. Pembangunan Tampung Air Baku DAS Kawal Kab. Bintan
2. Pembangunan Estuari Dam Sei Gong Kota Batam
3. Pembangunan Estuari Dam Rempang Utara Kota Batam
4. Pembangunan Estuari Dam Dompok Kota Tanjungpinang
5. Pembangunan Estuari Dam Busung Kab. Bintan
6. Pembangunan Estuari Dam Teluk Nongsa Kota Batam
7. Pembangunan Estuari Dam Pulau Kepala Jeri Kota Batam

SANITASI

1. Pengelolaan Sampah Kota Batam

PENDIDIKAN

1. Pembangunan Techno Park berbasis industri (Kota Batam)
2. Pembangunan Techno Park berbasis kelautan dan pariwisata (Kab. Lingga)
3. USB SMP di daerah perbatasan (Kab. Lingga)
4. USB SMK di daerah perbatasan (Kab. Lingga)

KESEHATAN

1. Peningkatan fasilitas kesehatan dasar
2. Pengembangan Rumah Sakit Khusus Jiwa di Kota Batam



Terima Kasih